



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GATOT RIWI SETYANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **152774**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.153.720.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 585 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 603.720.000
3. Bangunan Seluas 27.2 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 875.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, KIA SPORTAGE JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ (4X2) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI EX250M Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT IGET 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 53.195.400**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.098.311.060
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.180.226.460
III. HUTANG	Rp.	135.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.044.626.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.